

## Kemenag Bantul Minta Khatib Tidak Ceramah Politik Saat Idul Adha 2024

**BANTUL (IM)** - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meminta kepada semua khatib untuk tidak berceramah terkait politik saat Shalat Idul Adha 2024. Hal ini guna mengantisipasi kejadian saat Shalat Idul Fitri 2024 terulang kembali.

Saat itu, salah satu khatib di Bantul berceramah tentang politik yang membuat sebagian besar jamaah membubarkan diri. Plh Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Bantul, Sugito membenarkan soal adanya imbauan tersebut. "Seluruh khatib kami minta untuk tidak menyampaikan hal-hal khilafiyah atau pun politis saat ibadah, termasuk saat pelaksanaan Shalat Idul Adha," kata Sugito, Jumat (14/6).

"Kami juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan takmir masjid.

Kami memberi imbauan agar mereka maupun para khatibnya tidak memberikan materi ceramah seputar khilafiyah dan politis," sambungnya.

Dia menjelaskan, para khatib diminta memberikan ceramah yang menyebarkan dan tidak memprovokasi. Menurutnya, ada banyak materi ceramah positif dan bermanfaat yang bisa disampaikan pada momen Idul Adha mendatang, seperti kisah para nabi.

"Sejauh ini, respons para takmir masjid sudah bagus. Mereka siap untuk menjalankan arahan kami," ujar Sugito.

"Lalu, kasus yang sempat viral itu juga sebenarnya sudah kami tindaklanjuti dan yang bersangkutan sudah berjanji untuk tidak mengulangi perilaku yang sama seperti waktu itu," pungkasnya. ● **pra**

DISKUSI DENGAN PARTAI NASDEM

## Cabup Bogor, Bicarakan Arah Kab. Bogor Kedepan

**CIBINONG (IM)** - Bakal Calon Bupati (Cabup) Bogor, Sulhaji Jompa bersilaturahmi dengan Ketua dan jajaran Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor. Mereka membicarakan arah pembangunan Bumi Tegar Beriman kedepan, dan menyatakan niat baik dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju lagi.

"Kedatangan saya hari ini ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor untuk meminta masukan dan diskusi, bagaimana arah pembangunan Kabupaten Bogor kedepan," kata Sulhaji Jompa kepada wartawan, Jumat (14/6).

Sulhaji Jompa menuturkan, bagi dirinya, visi misi dirinya maupun Partai Nasdem sama, hingga tidak menutup kemungkinan bersamasama dalam mewujudkan tujuan yang sama tersebut.

"Semangat dan visi misinya kami sama, pembangunan tidak lepas dari peran para politikus bekerjasama

dengan eksekutif demi mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor," tuturnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Kolonel (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap menjelaskan bahwa sosok Sulhaji Jompa telah berkiprah dalam pembangunan di Kabupaten Bogor.

Ia pun bakal memasukkan nama Sulhaji Jompa ke DPW Partai Nasdem Jawa Barat dan DPP Partai Nasdem, untuk dipertimbangkan sebagai Cabup Bogor.

"Saya yakin, Sulhaji Jompa ini memberikan nuansa baru untuk Partai Nasdem. Saat ini, Partai Nasdem di Kabupaten Bogor sedang beritikad membentuk koalisi sesama partai politik baik itu yang sebelumnya berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, ataupun tidak berkoalisi," jelas Kolonel (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap. ● **gio**



IDN/ANTARA

## PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAHAN STUNTING

Kader posyandu mengukur lingkaran kepala balita di Desa Kutuk, Undaan, Kudus, Jateng, Jumat (14/6). Pemerintah menyelenggarakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di 38 provinsi selama Juni 2024 untuk mendukung target penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen pada 2024.

## Pemkot Bogor Galakkan Gerakan Masif Pengelolaan Sampah

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menggalakkan gerakan masif pengelolaan sampah mulai dari pemilahan tingkat rumah tangga, komunal hingga komersial.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari di Kota Bogor, Jumat (14/6), menilai Kota Bogor yang merupakan kota maju seharusnya sudah tidak lagi mengandalkan open dumping atau membuang sampah secara terbuka.

Menurut Hery, tata kelola sampah untuk daerah selevel Kota Bogor harus ditingkatkan secara teknologi. Ditambah dengan faktor dan rekayasa sosial, kepada warga dan stakeholders dalam membuang sampah.

"Di waktu yang terbatas (menjadi pj wali kota) ini saya akan coba. Saya kan cuma delapan bulan. Secara jangka pendek akan kita galakkan apa yang sudah ada," kata Hery.

Beberapa program yang bisa dilakukan, kata Hery, yakni 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Serta program Bank Sampah yang akan diperluas.

"Kemudian yang bisa dilakukan sekarang adalah saya mencari anggaran untuk Refused Derived Fuel (RDF), pengelolaan sampah di dalam kota," jelasnya.

Dengan penyelesaian pengelolaan sampah di dalam Kota, menurut Hery akan ada penurunan timbulan volume harian sampah yang akan dibawa ke TPA.

Di mana Kota Bogor masih menggunakan TPAS Galuga di Kabupaten Bogor. Dengan volume timbulan sampah per hari sekitar 500 ton.

"Lumayan kalau ada sekian puluh persen dari timbulan sampah volume harian, sudah bisa selesai di dalam kota. Jadi kita tidak tergantung sebagian besar dibuang ke Galuga," ucapnya. ● **jai**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## OJK MENINJAU PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI BANTARGEBAH

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widayarsi Dewi (kiri) bersama Kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Sentosa (tengah) saat mendengarkan penjelasan dari pengelola sampah Organik dapur dengan maggot Tri Haryatno (kanan) Bantargebah, Bekasi, Jabar, Jumat (14/6). OJK mendorong para PUJK untuk lebih banyak memberikan akses pendanaan untuk pengelolaan sampah baik dari hulu maupun hilir.

## Komisi X DPR Kunjungi Pemkot Bogor, Bahas Problem Kurangnya Sekolah

Hanya ada 20 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor. Angka itu tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lulus dari sekolah dasar (SD) negeri dari 208 sekolah di Kota Bogor. Alhasil, 1.863 siswa SD tidak tertampung di SMP negeri.

**BOGOR (IM)** - Jajaran Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (14/6), membahas persoalan pendidikan di Kota Bogor.

Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin mengatakan, ada sejumlah perso-

alan pendidikan di Kota Bogor, di antaranya, masih kurangnya jumlah sekolah. "Tadi seperti masalah guru, sarpras (sarana prasarana), dan kekurangan sekolah," ucap Djohar saat diwawancarai, Jumat (14/6).

Djohar mengatakan, jumlah sekolah negeri di Kota Bogor masih belum mencu-

kupi. Diketahui, hanya ada 20 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor. Angka itu tidak sebanding dengan jumlah siswa yang lulus dari sekolah dasar (SD) negeri dari 208 sekolah di Kota Bogor.

Alhasil, 1.863 siswa SD tidak tertampung di SMP negeri. Sehingga mereka harus melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Kurangnya jumlah sekolah ini dinilai menjadi sumber permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor setiap tahun karena sebaran siswa tak merata.

Atas persoalan ini, Djohar mengatakan, Pemkot Bogor sedikitnya membutuhkan enam SMP Negeri baru. Djo-

har pun mengaku akan membahas permasalahan ini di tingkat nasional dengan melibatkan para menteri terkait.

"Ini masalah akan kita bahas secara nasional. Kami akan rapat komisi dan rapat kerja dengan menteri apa saja yang dibutuhkan," ungkap

Djohar.

Djohar berjanji, pihaknya akan membantu pemkot untuk mencari solusi terkait masalah pendidikan di Kota Bogor. Tak hanya soal kurangnya jumlah sekolah, tapi juga persoalan tenaga pendidik dan sarana prasarana. ● **pra**

## Tol Serpong-Balaraja Nambah 5 Km, Rampung Tahun Ini

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Bumi Serbaraja terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Serpong-Balaraja. Tol ini merupakan bagian dari salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah.

Dilansir dari keterangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jumat (14/6), saat ini tengah dilakukan penyelesaian konstruksi Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B CBD-Legok sepanjang 5,40 kilometer (km) dengan progres telah mencapai tahap akhir penyelesaian yakni 94,44%.

Sebelumnya pada tahun 2022, Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A BSD-CBD sepanjang 5,15 km telah diresmikan dan beroperasi. Kemudian untuk Seksi 2 Legok-Pasir Barat sepanjang 11,54 km dan Seksi 3 Pasir Barat-Balaraja sepanjang 18,57 km masih

dalam tahap persiapan.

Tol Serpong-Balaraja juga akan terkoneksi dengan sejumlah tol lainnya, yakni Tol Serpong - Ulujami yang juga terkoneksi dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 dan JORR 2.

Tol ini juga akan meningkatkan akses konektivitas dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Banten, Jakarta, dan sekitarnya yang semakin lancar.

Menurut BPJT, melalui kehadiran Tol Serpong-Balaraja yang melintasi wilayah Tangerang dan Banten, nantinya akan menjadi jalur alternatif bagi kelancaran pendistribusian pasokan komoditas, serta peningkatan perekonomian masyarakat yang berpotensi semakin berkembang.

"Jalan Tol ini diharapkan juga semakin mendukung konektivitas dalam pengembangan layanan logistik sekitar wilayah kawasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten," tulis BPJT. ● **pp**

## Tirta Kahuripan Salurkan 79 Hewan Kurban ke Masyarakat Kab. Bogor

**BOGOR (IM)** - Salah satu bentuk dari aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyalurkan bantuan 79 ekor hewan kurban di momen Idul Adha 1445 Hijriyah.

Pada hari Kamis kemarin, telah dilaksanakan pembagian bantuan hewan kurban secara simbolis kepada 5 (lima) masjid di sekitar kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan Cabang Pelayanan Cibinong.

Sedangkan sisanya akan didistribusikan langsung ke masjid-masjid yang berada di sekitar instalasi milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Plt Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Asep Wildan mengatakan rasa syukurnya karena dari tahun ke tahun perusahaannya dapat terus berbagi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang membutuhkan dan sekaligus bersinergi dengan program Pemkab Bogor yakni menurunkan angka stunting dengan pemenuhan gizi melalui asupan protein.

"Alhamdulillah di Idul Adha 1445 H ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dapat menyalurkan bantuan sebanyak 79 hewan kurban dengan rincian 70 ekor kambing dan 9 ekor sapi yang akan

didistribusikan langsung mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, semoga di tahun yang akan datang jumlah bantuan hewan kurban akan terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya," kata Asep Wildan kepada wartawan, Jumat (14/6).

Tak lupa, Asep Wildan juga mengajak kepada panitia kurban untuk tidak membuang limbah kurban ke sungai, karena akan mengganggu proses produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berakibat terganggunya pendistribusian air bersih kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Ia menjelaskan ada berbagai cara pengelolaan limbah kurban yang aman terhadap lingkungan salah satunya dengan bekerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah memiliki instalasi pengolahan limbah/pengolahan limbah kurban menjadi kompos atau pakan ikan/ternak dan yang paling mudah adalah menimbun limbah kurban kedalam tanah.

"Dengan demikian, pelaksanaan kurban dalam menyambut Idul Adha mendapatkan nilai ibadah tanpa mengganggu kelestarian lingkungan khususnya sungai sebagai sumber air," jelasnya. ● **gio**

## YOGYAKARTA DARURAT SAMPAH

## Kemenag Imbau Masyarakat Pakai Besek untuk Tempat Daging Kurban

**YOGYAKARTA (IM)** - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta meminta masyarakat menggunakan besek untuk tempat daging kurban pada Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak menggunakan alas sekali pakai saat shalat id.

Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Saeful Anwar mengatakan, pihaknya sudah meminta panitia hari besar Islam Kota Yogyakarta untuk mengurangi produksi sampah saat saat shalat id dan penyembelihan hewan kurban. "Kami imbau untuk membawa jasa salat dari tikar dan sadalah bukan koran bekas," ujarnya, Jumat (14/6).

Pihaknya mengimbau warga untuk mengurangi plastik dalam pembagian hewan kurban pada Idul Adha mendatang. "Pakai wadah alternatif berbahan organik seperti besek," kata dia.

Untuk diketahui besek adalah tempat berbentuk kubus yang terbuat dari anyaman bambu. Biasanya

besek digunakan untuk tempat makanan setelah upacara-upacara adat atau keagamaan di Yogyakarta.

Lebih lanjut Saeful mengatakan, sampai saat ini sudah ada 195 titik lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dengan ribuan jemaah. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jogja pun berharap agar masyarakat bisa menyikapi Hari Raya Idul Adha tahun ini dengan bijak terhadap sampah. Sehingga produksi sampah pun tidak membeludak.

Saeful menilai, dalam menjalani hari raya Idul Adha tahun ini masyarakat memang harus seminimal mungkin memproduksi sampah non organik. Supaya tidak memperparah situasi darurat sampah di Kota Yogyakarta. "Kami minta agar panitia dapat mengelola sampah non organik seminimal mungkin," ucap Saeful.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta larang masyarakat membersihkan atau membuang kotoran jeroan di sungai setelah me-

nyembelih hewan kurban. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) saat menjelang Idul Adha.

Salah satu isinya adalah dalam penanganan hewan kurban yang baik setelah penyembelihan hewan kurban, tidak diperbolehkan membuang jeroan atau kotoran hewan kurban di sungai.

"Kotoran tidak diperbolehkan dibuang di sungai atau di tempat lain. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ada ketentuannya bahwa pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan kurban," katanya, Selasa (11/6) lalu.

Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di luar rumah pemotongan hewan. "Idul Adha itu penyembelihan hewan kurban bisa diselenggarakan di masjid, mushola atau tempat manapun dengan catatan melaporkan ke Dinas Pertanian Kota Yogyakarta," kata dia. ● **pra**



IDN/ANTARA

## PERSIAPAN PENERAPAN KELAS RAWAT INAP STANDAR

Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki (kedua kiri) didampingi Direktur RS Qolbu Insan Mulia (QIM) dr. Ratna Ismoyowati (kanan) meninjau ruangan usai meresmikan gedung C enam lantai di RS QIM, Kab. Batang, Jateng, Jumat (14/6). Untuk mendukung Perpres tentang JKN, RS QIM bermitra dengan BPJS Kesehatan bersiap menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) dengan layanan berlaku paling lambat pada 30 Juni 2025.